

ANALISIS PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PADA LIMA KABUPATEN DI SULAWESI UTARA

Trully Syanne Welmina Mandagi¹, Paulus Kindangen², Debby Ch. Rotinsulu³
trullymandagi19@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan, pertanian dan perikanan terhadap tingkat kemiskinan pada lima kabupaten di Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di lima kabupaten sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Belanja pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Sulawesi Utara, (2) Belanja pemerintah di sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Sulawesi Utara (3) Belanja pemerintah di sektor perikanan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Sulawesi Utara dan (4) Secara bersama belanja pemerintah pada sektor pendidikan, pertanian dan perikanan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten di Sulawesi Utara.

Kata kunci: belanja pendidikan, pertanian, perikanan, kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of spending on education, agriculture and fisheries on poverty levels in five districts in North Sulawesi. The data used in this research is secondary data, namely data obtained based on available data and which have been compiled and published by Central Bureau of Statistics, Regional Medium-Term Development Plans in the five sample districts. The data analysis technique used in this research is panel data regression.

The results showed that (1) Government spending in the education sector had an insignificant effect on poverty in five districts in North Sulawesi, (2) government spending in the agricultural sector had a significant effect on poverty in five districts in North Sulawesi (3) government spending in the fisheries sector. significant effect on poverty in five districts in North Sulawesi and (4) Taken together, government spending on the education, agriculture and fisheries sectors has a significant effect on poverty in five districts in North Sulawesi.

Keywords: spending on education, agriculture, fisheries, poverty

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang pada era modern ini memiliki begitu banyak masalah, sehingga menghambat akan jalannya sistem perekonomian yang ada termasuk dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang. Artinya disini masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah penting yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung risiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak untuk diselesaikan karena kemiskinan bersifat persisten atau cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Bahkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan 17 tujuan sebagai kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development Goals*) tetap memprioritaskan masalah kemiskinan sebagai tujuan pembangunan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu agenda MDGs yang belum terselesaikan sampai tahun 2015. Dan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka mensukseskan SDGs dimana kemiskinan masih merupakan prioritas utama dari 17 indikator yang ada. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan. Badrul Munir (2002:10), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan.

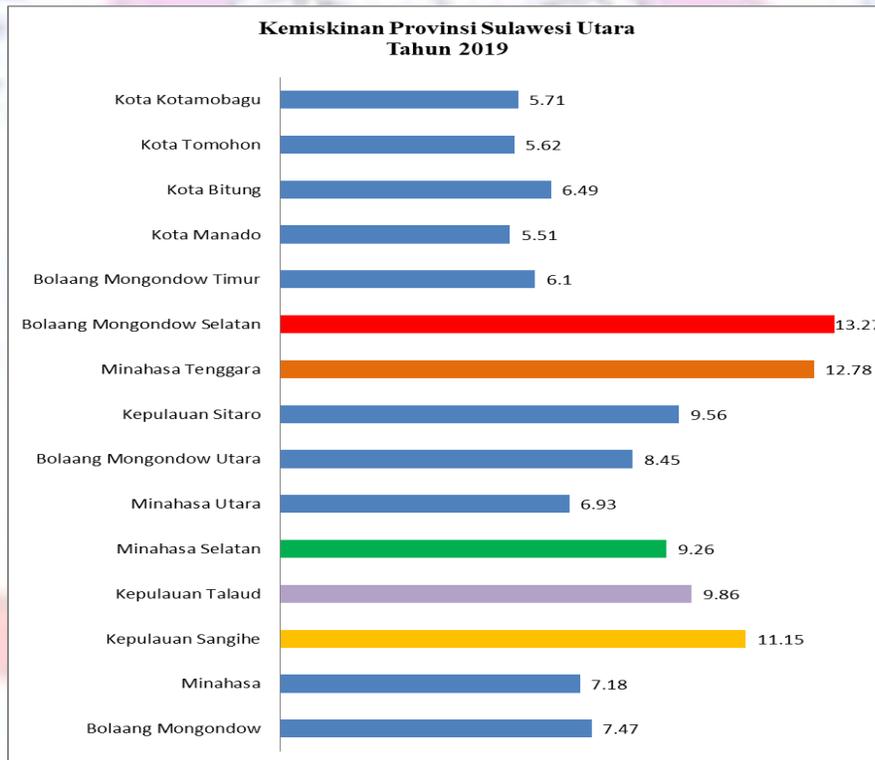
Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan ekonomi, kedua masalah tersebut menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki maupun perempuan untuk menjadi miskin (Widiastuti, 2016).

Data jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan menunjukkan angka yang semakin tinggi. Sejak terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia 1997 yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto, jumlah penduduk miskin melonjak tajam. Bantuan IMF turun pada Oktober 1997 dalam bentuk pinjaman uang terbukti belum bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi yang akhirnya menjadi krisis yang semakin lama berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan. Namun krisis yang berkepanjangan itu semata-mata bukan karena masalah ekonomi global saja tapi juga karena kegagalan dalam mengelola pembangunan. Dimana kebijakan pembangunan lebih mementingkan aspek pertumbuhan dari pada aspek pemerataan. Sebagai contoh, pembangunan secara terus menerus hanya dilakukan di kawasan Pulau Jawa dan Bali sedangkan masih banyak daerah terpencil di Indonesia bagian timur yang masih diabaikan.

Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Penanggulangan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, Beras Miskin (Raskin), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, presentase kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya pengurangan angka kemiskinan. Dan jika dilihat dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, dari lima besar provinsi penduduk miskin terbanyak cenderung ke Indonesia bagian timur. Data perkembangan kemiskinan per kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan ada 5 daerah dengan presentase kemiskinan tertinggi yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sitaro, berikut dilampirkan dalam grafik.

Grafik 1
Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2019



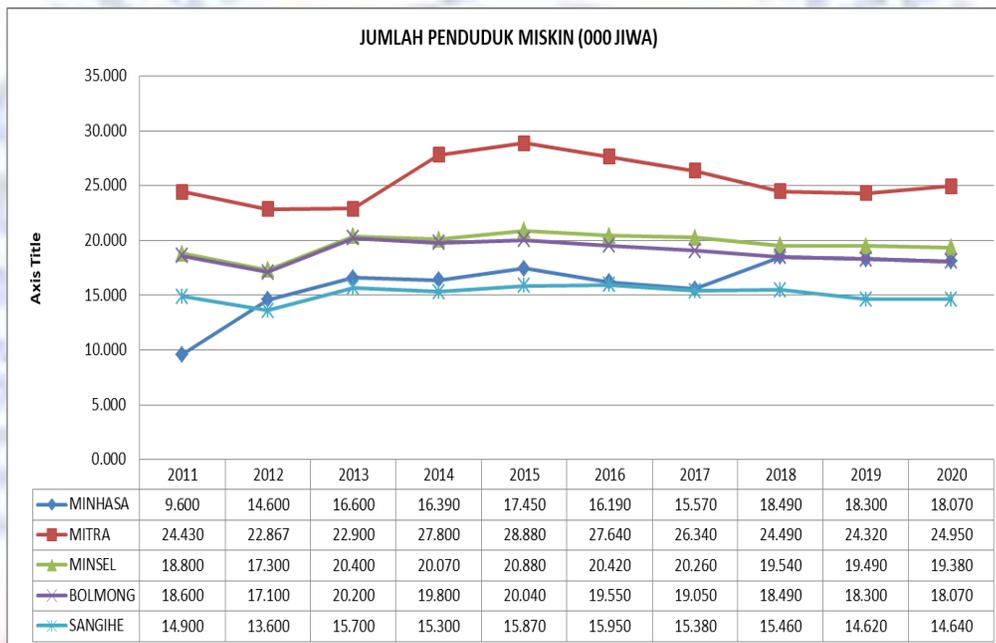
Sumber :Sulut dalam angka, 2020

Kemiskinan yang ada di masing-masing daerah kabupaten maupun kota bervariasi, untuk presentase tertinggi ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan pesentase nilai 13,27 dan untuk presentasi kemiskinan terendah adalah Kota Manado selaku ibu kota Provinsi Sulawesi

Utara dengan nilai presentase 5,51. Sementara untuk urutan kedua tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan nilai kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 12,78 persen.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut yang dikirim ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Minahasa Tenggara dan Minahasa tercatat secara beriringan menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Berikut ditampilkan dalam grafik kemiskinan :

Grafik 2
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe Tahun 2011-2020



Sumber :SULUT dalam angka, 2012-2021

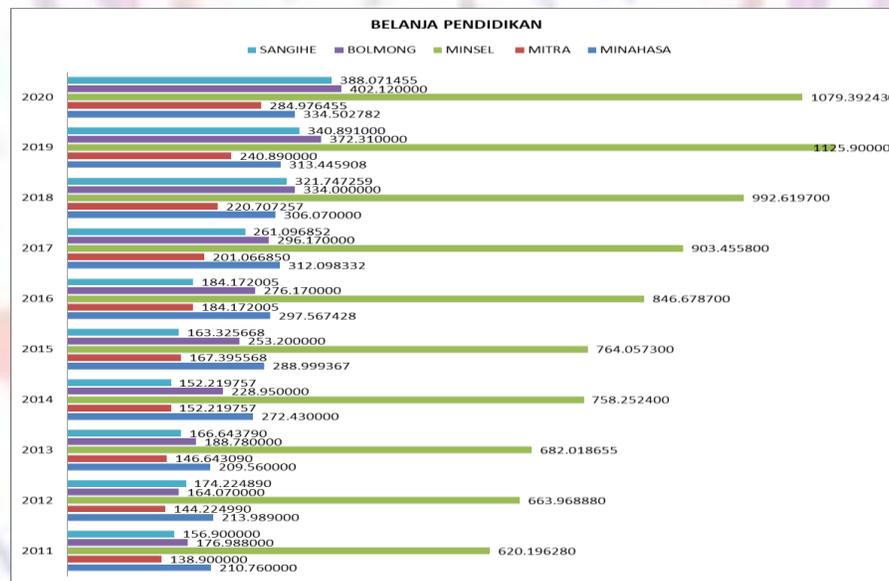
Grafik presentase kemiskinan yang ada di 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan dengan 4 kabupaten sampel lainnya, sementara penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tetapi dari trend data yang ada kelima kabupaten ini jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan angka. Penurunan angka kemiskinan di 5 Kabupaten ini ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya belanja pemerintah daerah.

Alokasi belanja dari pemerintah daerah merupakan salah satu indikator percepatan pembangunan yang terjadi di daerah, dimana alokasi belanja ini kemudian dibagi dalam dua kategori utama yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengelolaan pemerintahan daerah tentu tak bisa lepas dari desentralisasi, dimana fungsi dari desentralisasi ini sendiri adalah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan kemampuan serta memacu potensi yang dimiliki oleh daerah, untuk dapat terus maju dan berkembang. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan nyawa otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Dengan mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat diharapkan pelayanan publik dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada baik di pusat maupun daerah (Suparmoko, 2002).

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengetahui alokasi belanja yang tepat. Belanja yang dilakukan pemerintah yang dimaksud dikhususkan diberbagai sektor termasuk didalamnya belanja pendidikan, belanja pertanian dan belanja perikanan. Pengelolaan belanja pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Belanja pendidikan dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam satu periode (Bastian, 2009). Melalui kegiatan pengelolaan keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan, dibukukan secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Dan untuk realisasi dari belanja pendidikan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Kabupaten Kepulauan Sangihe di tampilkan dalam grafik 3 berikut :

Grafik 1.3
Belanja Pendidikan 5 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2011-2020



Sumber : RPJMD Kab. MITRA, Minahasa, MINSEL, BOLMONG dan Sangihe Tahun 2011-2020

Berdasarkan data grafik, belanja pendidikan di kabupaten sampel menunjukkan adanya perbedaan antara belanja pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa,

Mainahasa Selatan, Bolmong dan Kabupaten Kepulauan Sangehi mengalami perkembangan setiap tahunnya. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki realisasi total belanja tertinggi pertahun dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini dikarenakan jumlah sekolah yang ada menurut rangkuman dari Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara untuk total dari jumlah sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebanyak 814 sementara untuk Kabupaten Minahasa Tenggara hanya sebanyak 334 jumlah sekolah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada yaitu dengan memperhatikan belanja pendidikan. Terbukti melalui data yang dipaparkan bahwa belanja pendidikan pada setiap tahunnya meningkat. Selain belanja pendidikan, sebagai daerah kabupaten yang sumber pendapatan utamanya adalah dari hasil pertanian maka pemerintah memiliki peranan penting didalam membiayai dan menyalurkan anggaran belanja khusus untuk sektor pertanian.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pelaku pembangunan pertanian meliputi departemen teknis terkait, pemerintah daerah, petani, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Koordinasi diantara pelaku pembangunan pertanian merupakan kerangka mendasar yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pada hakekatnya, pembangunan pertanian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mencakup : fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat dan penyedia prasarana dan sarana fisik oleh pemerintah dengan fokus pemenuhan kebutuhan publik yang mendukung sektor pertanian serta lingkungan bisnis secara luas, dan akselerasi pembangunan wilayah dan stimulasi tumbuhnya investasi masyarakat serta dunia usaha dengan tujuan yaitu mengurangi angka kemiskinan di daerah kabupaten (Departemen Pertanian, 2010).

Tabel 1
Belanja Pertanian pada 5 Kabupaten di Sulawesi Utara
Tahun 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MINAHASA	1.514.200.000	1.542.065.500	1.652.075.000	1.710.800.000	1.707.359.700	1.872.100.000	1.928.600.000	1.954.000.000	2.109.000.000	2.291.173.600
MITRA	754.900.000	974.322.100	800.054.300	909.498.844	1.155.217.273	1.311.791.534	1.443.799.428	1.585.794.410	1.753.321.400	1.905.300.000
MINSEL	1.905.600.211	1.937.520.770	1.945.203.660	1.972.771.480	2.121.889.810	2.309.182.000	2.539.234.170	2.694.790.890	2.924.019.030	3.061.173.915
BOLMONG	1.951.940.000	2.111.470.000	2.235.030.000	2.485.490.000	2.485.093.460	2.764.560.000	3.044.290.000	3.336.333.000	3.460.720.000	3.542.660.000
SANGIHE	657.120.000	871.092.000	858.074.300	729.498.844	955.677.582	1.421.790.514	1.493.796.328	1.595.704.412	1.783.301.222	2.915.800.000

Sumber : RPJMD SULUT Tahun 2011-2020

Belanja pertanian pada Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun adanya perbedaan antara belanja pertanian di

Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa, alasan di balik adanya perbedaan belanja ini jika dilihat dari luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Minahasa menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 ada sebesar 75.000 hektar. Sementara untuk Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 21.500 hektar, kemudian Kabupaten Bolmong dengan cakupan wilayah pertanian yang besar serta dikenal sebagai daerah lumbung padi, Kabupaten Kepulauan Sangihe dikenal dengan penghasil cengkih dan pala terbaik. Maka pemerintah terus mengupayakan dari masing-masing kabupaten agar hasil dari pertanian lebih ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat agar mengurangi angka kemiskinan yang ada di masing-masing kabupaten ini. Selain sektor pertanian, sektor perikanan juga memiliki andil yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa selatan, Bolmong dan Sangihe.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pada saat krisis ekonomi, peranan sektor perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha, padahal bila sektor perikanan dikelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat terutama masyarakat nelayan dan petani ikan (Mulyadi, 2005 :15). Permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku usaha perikanan kini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha bidang perikanan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat pesisir di pedesaan, dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS untuk belanja perikanan di kabupaten sampel dapat dilihat dalam grafik berikut :

Tabel 2
Belanja Perikanan 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MINAHASA	3.142.000.000	3.330.658.000	3.530.529.000	4.200.430.090	4.212.908.000	4.921.562.070	4.568.490.000	4.879.241.000	5.020.242.000	5.172.697.000
MITRA	872.222.000	899.230.400	921.505.000	976.161.507	909.289.188	962.458.533	1.047.344.248	1.139.545.723	1.232.358.800	1.809.000.000
MINSEL	1.351.856.600	1.369.000.000	1.472.008.800	1.481.139.800	1.484.451.709	1.492.673.100	1.528.006.310	1.532.751.020	1.540.985.410	1.611.588.290
BOLMONG	1.397.422.000	1.402.946.370	1.476.389.000	1.602.637.400	1.702.637.000	1.796.918.000	2.472.680.000	2.503.938.000	3.182.737.600	3.364.728.000
SANGIHE	942.646.000	999.230.400	972.589.000	996.161.514	1.009.289.188	1.669.478.532	1.747.254.209	2.149.555.063	2.252.359.300	2.009.000.000

Sumber : RPJMD SULUT Tahun 2011-2020

Berdasarkan tabel belanja perikanan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara justru lebih besar dibandingkan dengan belanja perikanan yang ada di Kabupaten Minahasa. Ini dikarenakan wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa daerah pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Minahasa Tenggara mencatat, setidaknya ada 22 desa yang berada di kawasan pesisir di daerah tersebut dan mempunyai potensi perikanan tangkap. Desa-desa ini berada di kawasan pesisir pantai yang ada di tiga kecamatan yakni Posumaen, Belang, dan Rataotok, yang mempunyai potensi perikanan yang besar. Beberapa potensi yang menjadi perhatian yakni produksi perikanan tangkap, tambak, pembudidayaan, rumput laut. Ini merupakan potensi-potensi yang ada dan sebagiannya sudah dilaksanakan dengan bantuan atau pendampingan dari pemerintah. Belanja pemerintah terhadap sektor perikanan ini diharapkan mampu memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan yang ada di daerah, untuk itu pemerintah memegang peranan penting didalamnya.

Intervensi Pemerintah dalam perekonomian dilakukan karena dua alasan yaitu kegagalan pasar dan redistribusi (Gruber: 2013). Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar gagal dalam mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi (*resources*) secara efisien dan optimal untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Kegagalan pasar tersebut disebabkan antara lain adanya barang publik, kompetisi yang tidak sempurna, informasi yang tidak simetris, dan adanya eksternalitas.

Dalam tataran implementasinya, intervensi Pemerintah pusat dalam perekonomian direalisasikan dalam bentuk belanja negara. Belanja negara diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu belanja menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Menurut fungsinya anggaran belanja negara dialokasikan menjadi 11 fungsi pelayanan oleh Pemerintah yaitu fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan klasifikasi menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, subsidi, hibah, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain (Bultek No 4, 2006). Berdasarkan klasifikasi ekonomi, jenis belanja Pemerintah yang erat kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan adalah bantuan sosial, belanja modal, dan subsidi. Menurut Bultek No.4 (2006), bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta. Selain melalui belanja daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung ada salah satu faktor penunjang pengurangan angka kemiskinan, yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur, guna memperlancar akses ekonomi.

Pengeluaran daerah merupakan cerminan kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan desentralisasi fiskal dicerminkan dalam pengeluaran daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran yang dianggap sangat erat kaitannya dengan kemiskinan atau menjadi faktor penentu untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Pengeluaran tersebut adalah belanja pendidikan, belanja pertanian dan belanja perikanan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti pengaruh dari belanja pendidikan, belanja pertanian, dan belanja perikanan terhadap tingkat kemiskinan pada 5 Kabupaten di Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pertanian terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja perikanan terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara
4. Untuk mengetahui secara bersama pengaruh belanja pendidikan, pertanian dan perikanan terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan dikatakan dengan suatu keadaan seseorang ketika tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan keahlian yang rendah, keterkucilan sosial karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Singkatnya, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan dalam materi pada sejumlah atau segolongan orang daripada standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan dalam Dewi, 2011).

Bappenas (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi jika seseorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan tidak mampu untuk memenuhi hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar dimiliki oleh masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perbuatan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan.

Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sukirno (2000), “Pengeluaran Pemerintah (*Government Expediture*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahunnya.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkosoebroto, 2001).

Konsep Pengeluaran Pemerintah menurut Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. “Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + (X-M)$. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah”. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui berapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Belanja Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Pemerintahpun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 2004).

Menurut Erlina dkk (2012), anggaran negara/daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk satu periode mendatang yang berisi tentang pendapatan dan belanja negara/daerah yang menggambarkan strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk pembangunan negara/daerah yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan instrument politik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2005) anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Sektor Pendidikan

Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan (M. Asrori Ardiansyah: 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. Biaya satuan pendidikan.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
- c. Biaya pribadi peserta didik.

Nanang Fattah (2002: 23) menyebutkan bahwa biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan akan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di Sekolah. Atau bisa berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penjelasan (*Explanatory Research*), yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesa. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:134) menjelaskan bahwa explanatory research adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti serta untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik dan lain-lain khususnya tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Objeknya adalah Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu :

1. Data Kemiskinan Tahun 2011-2020 diperoleh dari Badan Pusat Statistik di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara
2. Data dana realisasi Belanja Pendidikan Tahun 2011-2020 diperoleh dari RPJMD di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara
3. Data dana realisasi Belanja Pertanian Tahun 2011-2020 diperoleh dari RPJMD di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara
4. Data dana realisasi Belanja perikanan Tahun 2011-2020 diperoleh dari RPJMD di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik berupa *soft copy*, kepustakaan, dan buku-buku yang berkaitan kemiskinan dan belanja pemerintah.

Penelitian ini dilakukan selama bulan Januari 2021 hingga pada bulan Mei 2021 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana besar pengaruh belanja pendidikan, pertanian dan perikanan terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Data yang digunakan dalam model penelitian ini akan disajikan pada lampiran. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan (Y) adalah jumlah penduduk miskin di kabupaten sampel yang dihitung dalam satuan ribu jiwa.
2. Belanja Pendidikan (X_1) adalah realisasi belanja pendidikan daerah di kabupaten sampel yang dihitung dalam rupiah pertahun.
3. Belanja Pertanian (X_2) adalah realisasi belanjapertanian daerah di kabupaten sampel yang dihitung dalam rupiah pertahun.
4. Belanja Perikanan (X_3) adalah realisasi belanja perikanan daerah di kabupaten sampel yang dihitung dalam rupiah pertahun.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh belanja pendidikan, pertanian dan perikanan terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Sulawesi Utara dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui metode regresi data panel. Pengolahan data menggunakan program *Microsoft Excel* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel merupakan kombinasi antar data *time series* dan data *cross section*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak individu, sedangkan *time series* data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi

dimana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*). Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*.

Data panel merupakan sebuah set data yang berisi data sampel individu pada sebuah periode waktu tertentu (Ekananda, 2014). Selanjutnya akan didapatkan berbagai observasi pada individu di dalam sampel. Dengan kata lain, data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*crosssectional*).

Panel adalah data yang diperoleh dari data *cross section* yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu (Tarigan, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian model dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode yaitu *common effect models*, *fixed effect models* dan *random effect models*. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Pendekatan Model Common Effect

Pendekatan model *common effect* ini mengasumsikan bahwa intersep dan slope yaitu tetap sepanjang waktu dan individu, kemudian adanya perbedaan intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (*error* atau *residual*). Hasil regresi model *common effect* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Hasil Regresi Model Common Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Kem	1.535315	0.209409	7.331665	0.0000
Bpd	0.044455	0.060971	0.729108	0.4696
Bpt	0.233283	0.058905	3.960335	0.0003
Bpi	0.186366	0.095538	1.950711	0.0572
R-squared	0.554470	Mean dependent var		1.270936
Adjusted R-squared	0.505849	S.D. dependent var		0.090742
F-statistic	5.233694	Durbin-Watson stat		0.388368
Prob(F-statistic)	0.003422			

Sumber : olahan views 0.8

Dari hasil penelitian common effect model diperoleh persamaan sebagai berikut:

- a. $\ln Kem_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln Bpd_{it} + \beta_2 \ln Bpt_{it} + \beta_3 \ln Bpi_{it} + e_{it}$
- b. $1.535315 Kem = 0.044455 Bpd + 0.233283 Bpt + 0.186366 Bpi$
- c. Dalam pendekatan estimasi ini, intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu, adanya perbedaan intersep dan slope di asumsikan akan dijelaskan oleh variable gangguan (error atau residual).
- d. Dari hasil regresi pada model common effect models didapatkan bahwa nilai koefisien belanja pendidikan adalah 0.044455, koefisien belanja pertanian adalah 0.233283, koefisien belanja perikanan adalah 0.186366. dengan R-squared sebesar 0.554470.

Pendekatan Fixed Effect Model

Pendekatan model fixed effect tidak memperhatikan dari dimensi waktu ataupun dimensi individu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu. Hasil regresi model fixed effect dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Hasil Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Kem	1.103438	0.227498	4.850331	0.0000
Bpd	0.055869	0.173807	0.321445	0.7495
Bpt	0.040731	0.137267	0.296726	0.7681
Bpi	0.031801	0.128370	0.247732	0.8055
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.788590	Mean dependent var	1.270936	
Adjusted R-squared	0.753355	S.D. dependent var	0.090742	
F-statistic	22.38082	Durbin-Watson stat	0.950725	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olahan Eviews 0.8

Persamaan yang ditemukan dalam hasil fixed effect mode dengan nilai koefisien yakni $1.103438Kem = 0.055869Bpd + 0.040731Bpt + 0.031801 Bpi$, dengan probabilitas 0,0000, nilai r square 0,788, dari hasil yang ada belanja dari sektor perikanan menunjukkan angka negatif.

Pendekatan Random Effect Model

Pendekatan model random effect didasarkan adanya perbedaan antara intersep dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antara individu atau obyek. Berikut ini hasil dari regresi model random effect dalam penelitian ini:

Tabel 5
Hasil Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Kem	1.139805	0.220828	5.161497	0.0000
Bpd	0.069291	0.146571	0.472749	0.6386
Bpt	0.007444	0.118905	0.062606	0.9504
Bpi	0.019866	0.122422	0.162276	0.8718
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.136201	0.9013
Idiosyncratic random			0.045065	0.0987
Weighted Statistics				
R-squared	0.423357	Mean dependent var	0.132258	
Adjusted R-squared	0.440338	S.D. dependent var	0.043145	
S.E. of regression	0.044006	Sum squared resid	0.089081	
F-statistic	0.366698	Durbin-Watson stat	0.879068	
Prob(F-statistic)	0.777356			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.446259	Mean dependent var	1.270936	
Sum squared resid	0.422132	Durbin-Watson stat	0.298597	

Hasil random effect model menunjukkan persamaan nilai koefisien yaitu :

1.139805 Kem = 0.069291 Bpd + 0.007444 Bpt + 0.019866 Bpi, dengan probabilitas 0,000 dan nilai R square 0,423

Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara estimasi model common effect maupun estimasi model fixed effect. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

Ho: memilih menggunakan model estimasi Common Effect.

H1: memilih menggunakan model estimasi Fixed Effect.

Dalam menentukan model yang tepat untuk digunakan maka dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 5% (signifikan) maka model estimasi yang akan digunakan adalah fixed effect, akan tetapi jika nilai signifikansinya lebih dari 5% (tidak signifikan) maka model yang digunakan adalah model common effect. Berikut adalah hasil pengujiannya:

Tabel 6
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.527811	(4,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	63.014702	4	0.0000

Sumber : olahan eviews 0.8

Berdasarkan hasil pengujian antara common effect dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% ($0,0000 < 0,05$). Secara statistik menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed effect.

Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara estimasi model fixed effect maupun estimasi model random effect. Apabila nilai probabilitasnya signifikan maka model yang digunakan adalah fixed effect. Sebaliknya apabila nilai probabilitasnya tidak signifikan maka model yang digunakan adalah random effect.

Tabel 7
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.862848	3	0.8344

Sumber : olahan eviews 0.8

Berdasarkan tabel uji Hausman diperoleh nilai distribusi chi- square dari perhitungan menggunakan Eviews 8 sebesar 0.862848 dengan probabilitas 0.8344 (lebih dari 5%), sehingga model yang tepat digunakan adalah model estimasi random effect.

Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara menyeluruh.

Hipotesis:

Ho : $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: variabel independen tidak berpengaruh

Ha : $\beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: variabel independen berpengaruh

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F- statistik) yaitu sebesar 0.777356. Nilai Probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari alfa 10% ($0.777356 < 0,10$) maka model signifikan 10% dan menolak Ho. Hal ini menunjukkan bahwa model layak dan variabel belanja pendidikan, belanja pertanian, dan belanja perikanan berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe.

Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Variabel Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Variabel Belanja Pendidikan memiliki t hitung sebesar 0.729108 dengan $\alpha = 5\%$

df = n-k

= 50 - 4

= 46

Berdasarkan t tabel maka diperoleh t kritis dengan df = 46 dan $\alpha = 5\%$ yaitu 1,684. Jadi, t hitung < t kritis sehingga menolak Ha. Artinya variabel belanja pendidikan tidak berpengaruh

terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe. Alasan yang dapat dikemukakan karena pendidikan merupakan sektor yang memiliki sifat jangka panjang, dan tidak secara langsung dapat memberikan dampak terhadap kemiskinan dikarenakan anggaran atau belanja yang di berikan kepada pendidikan adalah khusus untuk membangun sarana dan prasaran pendidikan, dan bukan dikhususkan bagi orang miskin.

Variabel Belanja Pertanian Terhadap Kemiskinan

Variabel Belanja Pertanian memiliki t hitung sebesar 3.960335 dengan $\alpha = 5\%$

$$\begin{aligned}df &= n-k \\ &= 50 - 4 \\ &= 46\end{aligned}$$

Berdasarkan t tabel maka diperoleh t kritis dengan $df = 46$ dan $\alpha = 5\%$ yaitu 1,684. Jadi, t hitung $>$ t kritis sehingga menolak H_0 . Artinya variabel belanja pertanian berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe. Alasan yang dapat dikemukakan karena sebagian besar penduduk yang ada di daerah Sulawesi Utara terutama wilayah Kabupaten penduduknya berprofesi sebagai petani, dan sumber pendapatan sehari-hari bersandar pada hasil pertanian. Sehingga anggaran yang di berikan pemerintah terhadap sektor pertanian dapat dikatakan tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di kabupaten.

Variabel Belanja Perikanan terhadap Kemiskinan

Variabel Belanja Perikanan memiliki t hitung sebesar 1.950711 dengan $\alpha = 5\%$

$$\begin{aligned}df &= n-k \\ &= 50 - 4 \\ &= 46\end{aligned}$$

Berdasarkan t tabel maka diperoleh t kritis dengan $df = 46$ dan $\alpha = 5\%$ yaitu 1,684. Jadi, t hitung $>$ t kritis sehingga menolak H_0 . Artinya variabel belanja perikanan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe. Berpengaruhnya belanja perikanan terhadap kemiskinan, karena jika di tinjau dari wilayah, kelima kabupaten ini masing-masing memiliki wilayah pesisir pantai, dan sebagian dari penduduk berprofesi sebagai nelayan. Belanja perikanan yang di salurkan pemerintah terhadap sektor perikanan dapat membantu penduduk khususnya yang berprofesi sebagai nelayan untuk mengembangkan potensinya sehingga mampu menunjang perekonomian keluarga dan mengurangi angka kemiskinan.

Pembahasan

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, hasil pertanian, hasil perikanan dan ketidakberdayaannya

untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, fasilitas di berbagai sektor yang mengalami pengurangan. Beberapa upaya pemerintah yang dilakukan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan daerah terutama pada 5 Kabupaten di Sulawesi Utara yakni Minahasa. Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe dengan cara meningkatkan belanja daerah pada sektor-sektor yang memiliki peranan yang cukup besar terhadap pengembangan daerah tersebut, terutama pada daerah kabupaten yaitu pendidikan, pertanian dan perikanan. Penyediaan dana belanja daerah khususnya dalam bidang pelayanan dasar cenderung akan meningkatkan pembangunan, hal ini dikarenakan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mehmood (2010) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran besar dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara diantaranya melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada sektor pertanian dan perikanan. Pengeluaran pada bidang pendidikan akan memberikan kontribusi secara langsung dalam pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan pengeluaran infrastruktur pertanian dan perikanan berperan dalam menunjang jalannya aktivitas perekonomian. Salah satu tujuan dari pembangunan adalah menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan pada 5 kabupaten di Sulawesi Utara ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Alasannya karena belanja pendidikan tidak meyeentuh langsung pada kemiskinan dan berbentuk jangka panjang. Belanja kemiskinan yang direalisasikan tidak hanya dikhususkan bagi masyarakat miskin saja tetapi mencakup secara umum. Perolehan hasil yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Ita Aristina 2017 dengan judul Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, dan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Bali. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoan Bahalau 2015 dengan judul pengaruh kebijakan fiskal terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral dibanyak negara. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin. Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Dimana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya. Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan

mampu menjawab persoalan kemiskinan. Keterikatan hubungan antara pendidikan dan kemiskinan sangat besar karena pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Menurut Sahdan dalam Nasir, Sachudin dan Maulizar, menyebutkan variabel penyebab kemiskinan antara lain : pendidikan yang rendah, rendahnya mutu kesehatan, kepemilikan alat produktif yang terbatas, rendahnya penguasaan teknologi. M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Menuju Indonesia Sejahtera” juga menyebutkan diantaranya adalah kualitas pendidikan dan tingkat pengangguran. Kemiskinan disebabkan karena menganggur akibat pendidikan yang rendah, sehingga tidak memperoleh penghasilan Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

Selain sektor pendidikan sektor pertanian juga merupakan salah satu faktor yang menunjang didalam mengurangi angka kemiskinan. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Kontribusi dominan sektor pertanian khususnya dalam pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Adapun sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu lahan pertanian dapat diwujudkan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsinya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan tingkat kemiskinan. Kondisi ini menjelaskan jika sektor pertanian menjadi tumpuan hidup mayoritas penduduk miskin di 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara karena sebagian besar dari mereka bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dan dari hasil penelitian yang diperoleh belanja pendidikan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Dan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bella Ginantie 2016 dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pertanian mampu mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur terutama pada daerah pedesaan. Terdapat banyak penjelasan mengenai penyebab kemiskinan. Salah satu penyebab umum terjadinya kemiskinan adalah adanya keterbelakangan perekonomian pada suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2000), negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi tradisional, serta sikap apatis terhadap lingkungan. Daerah perkotaan umumnya basis aktivitas ekonominya bukan di sektor pertanian, berbeda dengan di pedesaan yang sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertanian. Oleh sebab itulah penduduk miskin lebih banyak berada di pedesaan. Munculnya kemiskinan yang besar di sektor pertanian di Indonesia disebabkan tidak meratanya akses petani terhadap faktor produksi terutama lahan dan modal (Budiantoro, 2013). Ketertinggalan dan keterbelakangan dalam akses tersebut kemudian menciptakan rendahnya produktivitas di sektor pertanian itu sendiri. Produktivitas yang rendah tercermin dari tingkat pengembalian yang rendah.

Tingkat pengembalian yang rendah untuk tenaga kerja di sektor pertanian tercermin melalui upah rata-rata dan jam kerja yang rendah di sektor tersebut.

Selain pertanian adapula sektor yang menunjang akan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh pemerintah daerah melalui belanja perikanan. Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit, maka mata pencaharian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut. Pengalihan kegiatan ekonomi di laut dikhawatirkan sulit terjadi, sebab para anak nelayanpun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Jika hal itu terjadi, maka kegiatan di darat akan semakin padat, sedangkan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan terabaikan. Akibatnya potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut akan sia-sia. Agar yang demikian itu tidak terjadi, maka dibutuhkan perhatian dari semua pihak terhadap nasib para nelayan. Perhatian itu tentunya bukan sekedar dalam bentuk empati, melainkan lebih dari itu, yaitu mencari alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Beberapa daerah di 5 Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe memiliki daerah pesisir yang didalam kehidupan sehari-hari menggantungkan pendapatan pada sektor perikanan. Peranan pemerintah didalam menunjang sektor perikanan melalui pemberian sarana dan prasarana untuk para nelayan yang di tuang langsung dalam belanja perikanan merupakan salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten. Dan dari hasil penelitian ini menjelaskan dimana belanja perikanan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Laderon Aldore (2020) menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kota Bitung dapat memberikan pengaruh terhadap kemiskinan absolut yang ada. Salah satu sumber pertumbuhan yang utilitas dan kapasitas produksi diharapkan dapat menolong bangsa ini keluar dari permasalahan kemiskinan dengan meningkatkan potensi dan hasil produksi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat diajukan beberapa kesimpulan

1. Belanja pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
2. Belanja pemerintah pada sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
3. Belanja pemerintah di sektor perikanan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
4. Secara bersama belanja pemerintah pada sektor pendidikan, pertanian dan perikanan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara

Saran

1. Untuk Pemerintah

Didalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah mengeluarkan berbagai program khususnya didalam kebijakan anggaran, mulai dari anggaran pendidikan, pertanian maupun perikanan yang menjadi salah satu alat tolak ukur bagi pemerintah didalam membantu masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan daerah kabupaten. Semua ini dilakukan untuk memberi lebih banyak jalan kaum miskin keluar dari labirin kemiskinan mereka. Solusi multidimensi inilah yang diharapkan memberikan harapan dari kelangkaan yang mereka alami. Pemerintah di harapkan serius menangani masalah pendidikan, pertanian dan perikanan dengan memberikan beasiswa pendidikan khusus bagi masyarakat miskin, bantuan bagi petani dan nelayan masyarakat miskin pada 5 kabupaten di Sulawesi utara yakni, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow dan Sangihe.

2. Untuk Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani Arum S, dan Widyastuti N. (2016) ‘Pengaruh Pemberian Jus Jeruk Manis (*Citrus sinensis*) Terhadap Nilai VO₂max Atlet Sepak Bola Di Gendut Doni Training Camp (GDTC) Salatiga’, 5, pp. 262–268.
- Ardiansyah, Asrori. Kebiasaan Belajar. <http://kabar-pendidikan.blogspot.com>. (2 juni 2012)
- Alderon Edi Aidore 2020. Pengaruh kebijakan pemerintah produksi sektor perikanan dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemsikinan di Kota Bitung. Vol 21, No 1 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Indonesia
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2009. Akuntansi Biaya, edisi I, Mitra Wacana, Media, Jakarta
- Budiantara, I.N., 2013, Spline dalam Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik: Sebuah Pemodelan Statistika Masa Kini dan Masa Mendatang, JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol. 3, No.1, (2014) 2337-3520 (2301-928X Print), Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- BAPPENAS. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Januari 2005.
- Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: 1996.
- Ekananda, Mahyus. 2014. Analisis Data Time Series. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Erlina, dkk.2015. Akuntansi Keuangan daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, Cet. 9.
- Gruber, Jonathan. 2011. Public Finance and Public Policy: 3rd Edition. New York, Worth Publisher.
- Mangkoesobroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Edisi 3. Yogyakarta: FE UGM.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1994. Kebijakan Publik Indonesia Subsidi dan Urgensi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mehmood, Rashid., and Sara Sadiq. (2010). *The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis. Romanian Journal of Fiscal Policy Volume 1, Issue 1, July-December 2010, Pages 29-37*
- Mulyadi, 2005, Akuntansi Biaya, Edisi Kelima, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Munir, Badrul. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Suparmoko, M. 2002 "Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah" edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan Di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, Metode Penelitian Survei (Editor), LP3ES, Jakarta
- Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi. Jakarta : PT Bumi Aksara.